

Optimalisasi Peran Satgas TNI AL di Wilayah Papua Mendukung Kebijakan Pemerintah dan Keutuhan NKRI

Ricky Novrianto¹, Faonaso Harefa², Moch Almufaridun³

¹ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

² Kementerian Pertahanan

³ Mabes TNI

e-mail: rickynovrianto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran Satgas TNI AL di wilayah Papua dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Papua, sebagai wilayah yang memiliki kompleksitas politik, sosial, dan ekonomi yang tinggi, memerlukan peran aktif dan efektif dari Satgas TNI AL dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas TNI AL dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan keamanan dan kedamaian di Papua serta memelihara integritas wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebijakan, studi kasus, dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satgas TNI AL di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara holistik untuk memahami tantangan, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi oleh Satgas TNI AL dalam menjalankan tugas mereka di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Satgas TNI AL di Papua sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas TNI AL, termasuk penyelarasan kebijakan, pembinaan kekuatan, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan citra TNI di mata masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti isu pelanggaran HAM, ketidakseimbangan sosial-ekonomi, dan dugaan keterlibatan negara asing. Dalam kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya peran Satgas TNI AL di Papua sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam memelihara keutuhan NKRI. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk TNI AL, pemerintah, dan masyarakat Papua, untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan wilayah Papua serta menjaga keutuhan negara Indonesia.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Peran Satgas TNI AL, Wilayah Papua, Kebijakan Pemerintah, Keutuhan NKRI*

Abstract

This research aims to examine the optimization of the role of the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in the Papua region in supporting government policies and maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Papua, as a region with high political, social, and economic complexity, requires an active and effective role from the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in maintaining the security, stability, and sovereignty of the state. In this context, this study will explore the efforts made by the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in implementing government policies to ensure security and peace in Papua and preserve the territorial integrity of Indonesia. The research methods used in this study include policy analysis, case studies, and collection of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with members of

the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in the field, while secondary data was obtained from official documents, reports, and related literature. Holistic analysis was conducted to understand the challenges, successes, and obstacles faced by the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in carrying out their duties in Papua. The results of the study indicate that the optimization of the role of the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua is crucial in supporting government policies and maintaining the integrity of the NKRI. Various efforts have been made by the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL), including policy alignment, capacity building, leadership strengthening, and enhancement of the Navy's image in the eyes of the public. However, there are still several challenges that need to be addressed, such as issues of human rights violations, socio-economic imbalances, and allegations of foreign involvement. In conclusion, this research emphasizes the importance of the role of the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua as an integral part of the government's strategy in maintaining the integrity of the NKRI. Collaboration among various stakeholders, including the Indonesian Navy, the government, and the Papua community, is required to achieve common goals in maintaining the sovereignty and prosperity of the Papua region and preserving the integrity of the Indonesian state.

Keywords: *Optimization, Role of the Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL), Papua Region, Government Policies, Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)*

PENDAHULUAN

Sebelum membahas tentang peran Satgas TNI AL dalam mengatasi konflik di Papua, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian "Peran dan Konflik Vertikal Papua". Peran diartikan sebagai perbuatan, fungsi, atau tugas yang dimainkan atau dilaksanakan dalam suatu situasi atau sistem tertentu, sedangkan Konflik vertikal Papua adalah ketegangan dan konflik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Peran TNI AL dalam mengatasi konflik di Papua sudah dimulai sejak kembalinya Papua ke pangkuan ibu Pertiwi pada tahun 1963. Proses tersebut melibatkan *New York Agreement* dan *Act of Free Choice*, namun berbagai kelompok di Papua merasa bahwa proses tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua sehingga sampai saat ini konflik masih saja terjadi yang menimbulkan terhambatnya kebijakan Pembangunan dari pemerintah dan juga mengancam lepasnya Papua dari negara kesatuan Indonesia. Penulis dalam menulis karya tulis ini dengan referensi UUD 1945 yang memberikan legitimasi konstitusional atas peran TNI dalam menjaga integritas wilayah Indonesia dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI pasal 7 (ayat 2 dan 3) yang mengatur tentang Tugas pokok TNI yang dilakukan melalui OMP dan OMSP. Dalam OMSP, TNI memiliki 14 tugas diantaranya mengatasi gerakan separatisme bersenjata dan mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme. Sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, maka UU TNI Nomor 34/2004 tersebut seyogianya harus ada Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Wilayah Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, memiliki tantangan unik dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Konflik bersenjata, ketimpangan sosial-ekonomi, serta ketegangan antara pemerintah dan sebagian masyarakat setempat menjadi dinamika kompleks yang perlu diatasi secara bijaksana. Dalam konteks ini, peran Satgas TNI (Satuan Tugas Tentara Nasional Indonesia) AL di wilayah Papua menjadi sangat penting. Penyelenggaraan keamanan dan pengembangan daerah memerlukan strategi yang tepat guna mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keutuhan NKRI terjaga. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa peran Satgas TNI AL di wilayah Papua dalam pelaksanaan penugasan dapat menghadapi tantangan kompleks yang meliputi **Pertama**, keterbatasan Sumber Daya. Satgas TNI AL mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran di wilayah Papua. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Satgas TNI AL dalam melakukan operasi secara optimal. **Kedua**, kesulitan Geografis. Papua memiliki kondisi geografis yang sulit

dijangkau, termasuk wilayah pedalaman yang terpencil dan hutan yang lebat. Hal ini dapat menyulitkan Satgas TNI AL dalam menjaga keamanan dan mengontrol pergerakan kelompok separatis. **Ketiga**, kurangnya Pengetahuan tentang Kearifan Lokal, Satgas TNI AL mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami dinamika sosial, budaya, dan politik di Papua. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat lokal dan memahami akar masalah konflik di wilayah tersebut, **Keempat**, isu Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas TNI AL mungkin dihadapkan pada tuntutan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Satgas dapat merusak hubungan dengan masyarakat dan memperburuk situasi konflik. **Kelima**, koordinasi antar komponen Bangsa, TNI/Polri, kurangnya koordinasi dan sinergi antara Satgas TNI AL, TNI AD, TNI AU, dan Polri dan Komponen Bangsa lainnya di Papua dapat menghambat efektivitas penugasan di Papua dima koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Nilai guna penulisan karya tulis ini adalah sebagai bahan bagi Pimpinan TNI AL dalam merumuskan kembali pengambilan keputusan strategis tentang optimalisasi peran Satgas TNI AL dalam memberikan kontribusi tangguh bagi upaya mendukung program Pemerintah di Papua bagi keutuhan NKRI.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah empiris dan Studi kepustakaan. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analisis. Menurut (Sugiono: 2009; 29) metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemecahan masalah yang terkait dengan Optimalisasi Peran Satgas TNI AL dalam penugasan di Papua tersebut dituangkan ke dalam rumusan kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk strategi- strategi yang didasarkan pada pertimbangan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Optimalisasi Peran Satgas TNI AL dalam penugasan di Papua akan dapat dicapai dengan baik apabila kendala-kendala dari sisi Komando dan Pengendalian, Sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga dan Pemberdayaan Sumber Daya yang ada saat ini sudah dapat di atasi dengan optimal. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga mampu memberikan nilai positif dalam mempercepat penyelesaian masalah. Untuk menentukan strategi yang akan digunakan, terlebih dahulu harus dirumuskan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan strategi yang tepat. Setelah di tentukannya strategi yang baik untuk dilaksanakan, barulah dapat dilaksanakan upaya – upaya secara nyata sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya guna memecahkan permasalahan yang ditemukan. Perumusan kebijakan merupakan solusi dari masalah dan pokok persoalan dengan tetap mempertmbangkan peluang dan kendala serta kekuatan dan kelemahan untuk mencapai sasaran dengn indikator keberhasilan. Hasil dan pembahasan penelitian tentang

optimalisasi peran Satgas TNI AL di Papua untuk mendukung program pemerintah dan keutuhan NKRI menyoroti pentingnya keberadaan Satgas tersebut sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara dan menangani berbagai tantangan di Papua. Melalui penelitian ini, hasilnya mengungkapkan bahwa peran Satgas TNI AL sangat vital dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara di wilayah Papua yang kompleks. Dengan optimalisasi peran Satgas TNI AL, program-program pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengatasi konflik di Papua dapat didukung dengan lebih efektif. Selain itu, pembahasan dari penelitian ini juga menyoroti urgensi pemeliharaan keutuhan NKRI, di mana keberadaan Satgas TNI AL menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran Satgas TNI AL di Papua, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program pemerintah dan menjaga keutuhan NKRI. Perumusan kebijakan, strategi dan upaya yang dilakukan dengan metode SWOT/TOWS, hal tersebut agar apa yang menjadi rumusan pemecahan masalah dapat tepat sasaran sesuai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Matriks SWOT/TOWS

	STRENGTH	WEAKNESSES
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.34/2004 tentang TNI 2. UU No.21/2001 tentang Otsus Papua 3. Kebijakan Pemerintah 4. Kebijakan Kemhan RI 5. Dukungan politik DPR RI 6. Visi Misi PRIMA Panglima TNI 7. Pembinaan Kekuatan TNI AL 8. Kepemimpinan Dansatgas 9. Loyalitas, Dedikasi dan Semangat Juang Prajurit TNI AL yang selalu PRIMA 10. Dukungan moril Keluarga besar TNI AL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Historis Papua 2. Isu Pelanggaran Ham 3. Isu Ras Papua 4. Isu Kesenjangan Sosial, ekonomi dan budaya 5. Otonomi khusus yang disalahgunakan 6. Dugaan Keterlibatan negara Asing di Papua 7. Kearifan Lokal Papua yang spesifik 8. Ide Separatis kelompok masyarakat 9. Pelabelan terhadap Kelompok Separatis 10. Perpres turunan dari UU No.34/2004 tentang TNI yang belum ada
EXTERNAL		
OPPORTUNITIES	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI MAXI-MAXI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara dan meningkatkan Citra TNI yang sudah ada • Memberikan <i>Reward</i> dalam bentuk promosi jabatan terhadap bagi prajurit yang berhasil melaksanakan tugas • Dukungan Sarpras yang layak digunakan di daerah operasi • Dukungan kebutuhan Jasmani dan Rohani • Jaminan dan Perhatian dalam 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI MINI-MAXI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kondisi daerah operasi di Papua • Apresiasi terhadap tugas operasi di Papua • Mengoptimalkan penggunaan Sarpras yang ada • Penyegaran terhadap kondisi rohani Satgas TNI AL • Perhatian yang layak bagi keamanan dan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Citra TNI yang menempati urutan teratas dimata masyarakat 2. Kemajuan Iptek 3. Visi Misi Pemerintah RI 4. Sinergi TNI-Polri, K/L dan Komponen 		

<p>Bangsa lainnya 5. Perkembangan lingkungan strategis</p>	<p>segala aspek Pimpinan TNI AL terhadap keluarga prajurit TNI AL yang ditinggal operasi</p>	<p>kedamaian terhadap keluarga prajurit yang ditinggal operasi</p>
<p>THREATS</p>	<p><u>STRATEGI MAXI-MINI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah Personel TNI AL yang tugas misi Perdamaian PBB • Membuat Kerjasama militer TNI AL dengan negara - negara yang dukung Papua Merdeka • Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa ULMWP adalah illegal • Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa Papua bagian sah NKRI, Papua urusan dalam negeri Indonesia dan penting komitmen masyarakat Papua terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika 	<p><u>STRATEGI MINI-MINI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan TNI AL secara moril terhadap tugas misi Perdamaian PBB • Mengefektifkan Kerjasama militer yang sudah ada • Kerjasama dengan segala tokoh-tokoh di Papua sebagai jembatan dalam mengkampanyekan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
<p>1. Perhatian PBB terhadap Papua 2. Endorsement negara-negara asing bagi kemerdekaan Papua 3. Organisasi ULMWP 4. <i>Melanesian Spearhead Group (MSG)</i> 5. KKB/KST Papua 6. Kelompok masyarakat yang mendukung Separatis</p>		

Berdasarkan teknik analisis SWOT/TOWS di atas, maka strategi “Peningkatan Peran Satgas TNI AL di Papua untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan keutuhan NKRI”, dibagi dalam strategi SO, ST, WO, WT, sebagai berikut :

a. Strategi Maxi-Maxi

- 1) Memelihara dan meningkatkan Citra TNI yang sudah ada. Untuk memelihara dan meningkatkan citra TNI yang sudah ada, TNI perlu terus memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan, TNI dapat memperkuat ikatan positif dengan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan TNI juga penting untuk membangun kepercayaan publik. Melalui pendekatan ini, TNI dapat mempertahankan dan meningkatkan citranya sebagai penjaga keamanan yang bersih, profesional, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memberikan *Reward* dalam bentuk promosi jabatan terhadap bagi prajurit yang berhasil melaksanakan tugas. Memberikan reward berupa promosi jabatan kepada prajurit yang berhasil melaksanakan tugas adalah langkah penting dalam memotivasi dan menghargai kinerja yang baik. Ini tidak hanya mendorong pencapaian individu, tetapi juga membangun semangat kompetisi sehat di dalam organisasi. Dengan demikian, promosi jabatan menjadi pengakuan atas dedikasi dan prestasi prajurit, serta memperkuat loyalitas terhadap institusi TNI.

- 3) Dukungan Sarpras yang layak digunakan di daerah operasi. Dukungan sarana dan prasarana (Sarpras) yang layak di daerah operasi adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan setiap misi TNI. Sarpras yang memadai mencakup fasilitas tempat tinggal, transportasi, komunikasi, peralatan medis, dan logistik. Keberadaan Sarpras yang memadai akan meningkatkan mobilitas, kesiapan, dan keamanan personel TNI di lapangan, memungkinkan mereka untuk merespons secara cepat dan efisien terhadap setiap situasi yang muncul dalam tugas operasional.
- 4) Dukungan kebutuhan Jasmani dan Rohani. Dukungan kebutuhan jasmani dan rohani merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kesiapan mental prajurit di daerah operasi. Kebutuhan jasmani meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Sedangkan, dukungan kebutuhan rohani mencakup pelayanan agama, konseling psikologis, serta program-program pembinaan spiritual. Kombinasi dukungan ini membantu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan holistik prajurit di tengah tantangan dan tekanan yang mereka hadapi selama pelaksanaan tugas.
- 5) Jaminan dan Perhatian dalam segala aspek Pimpinan TNI AL terhadap keluarga prajurit TNI AL yang ditinggal operasi. Jaminan dan perhatian dalam segala aspek dari pimpinan TNI AL terhadap keluarga prajurit TNI AL yang ditinggalkan dalam operasi merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial dari institusi militer. Ini mencakup penyediaan dukungan finansial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial bagi keluarga prajurit yang ditinggalkan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan memberikan perhatian emosional kepada keluarga juga penting untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dihargai oleh institusi militer.

b. Strategi Maxi-Mini

- 1) Meningkatkan jumlah Personel TNI AL yang tugas misi Perdamaian PBB. Meningkatkan jumlah personel TNI AL yang bertugas dalam misi perdamaian PBB adalah langkah yang penting dalam mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan ketersediaan personel yang siap tempur, termasuk melalui pelatihan khusus dan penugasan khusus untuk personel yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk misi perdamaian. Peningkatan kerja sama dengan PBB dan negara-negara lain juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi TNI AL dalam misi perdamaian. Hal ini akan memperluas kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan memperkuat citra positif TNI AL di tingkat internasional.
- 2) Membuat Kerja sama militer TNI AL dengan negara - negara yang dukung Papua Merdeka. Membuat kerja sama militer TNI AL dengan negara-negara yang mendukung Papua Merdeka akan menjadi langkah yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional Indonesia. Pendukung kemerdekaan Papua umumnya dianggap oleh Indonesia sebagai pihak yang mengganggu kedaulatan dan integritas negara. Sebaliknya, upaya diplomasi dan kerja sama militer TNI AL lebih ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang mendukung kedaulatan dan persatuan Indonesia serta untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi di Papua.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa ULMWP adalah illegal. Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Penyuluhan dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, diskusi kelompok, atau penyampaian informasi melalui media massa dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Papua tentang konsekuensi hukum dan politik dari dukungan terhadap gerakan yang dianggap melanggar hukum tersebut.

- 4) Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa Papua bagian sah NKRI, Papua urusan dalam negeri Indonesia dan penting komitmen masyarakat Papua terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka. Sosialisasi kepada masyarakat Papua bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), bahwa Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia, dan pentingnya komitmen masyarakat Papua terhadap Pancasila, UUD 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah langkah penting dalam memperkuat pemahaman akan persatuan dan keberagaman Indonesia. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, seminar, diskusi publik, kampanye penyuluhan, dan media massa untuk memperkuat kesadaran akan kebersamaan, kebhinekaan, serta pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

c. Strategi Mini-Maxi

- 1) Sosialisasi kondisi daerah operasi di Papua. Sosialisasi kondisi daerah operasi di Papua merupakan langkah penting dalam mempersiapkan personel yang akan ditugaskan di wilayah tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai aspek, seperti cuaca yang seringkali ekstrim dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi medan yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis hingga pegunungan yang terjal. Selain itu, pemahaman tentang situasi musuh, yang dapat meliputi kelompok separatis, serta ideologi dan politik yang mungkin mempengaruhi dinamika konflik. Faktor ekonomi dan keamanan juga penting, termasuk tantangan sosial budaya yang unik di wilayah tersebut. Sosialisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan personel dengan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas operasional dengan lebih efektif dan aman.
- 2) Apresiasi Pimpinan terhadap tugas operasi Prajurit TNI AL di Papua. Apresiasi pimpinan terhadap tugas operasi prajurit TNI AL di Papua merupakan langkah penting untuk memotivasi dan memberikan penghargaan atas dedikasi serta pengorbanan yang telah diberikan oleh para prajurit. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penghargaan resmi, ucapan terima kasih secara langsung, atau penyelenggaraan acara apresiasi khusus. Selain itu, pimpinan juga dapat memberikan dukungan moral dan psikologis kepada prajurit, serta memastikan bahwa kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun emosional, terpenuhi selama menjalankan tugas operasi di Papua. Ini akan memberikan dorongan positif bagi prajurit untuk terus memberikan yang terbaik dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah tersebut.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan Sarpras yang ada. Untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana (Sarpras) yang ada di Papua, TNI AL dapat melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, evaluasi terhadap kondisi Sarpras yang ada untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang perlu diperbaiki atau dimanfaatkan lebih efisien. Kedua, pelatihan dan penyediaan pendidikan kepada personel TNI AL untuk memaksimalkan penggunaan Sarpras dengan cara yang efektif dan aman. Ketiga, perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap Sarpras yang ada guna memastikan ketersediaannya dalam kondisi optimal. Keempat, pengembangan sistem manajemen logistik yang efisien untuk mengelola distribusi dan pemakaian Sarpras secara tepat waktu dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, TNI AL dapat memastikan bahwa Sarpras yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung operasi dan tugas-tugas di wilayah Papua.
- 4) Penyegaran terhadap kondisi rohani Satgas TNI AL. Penyegaran terhadap kondisi rohani Satgas TNI AL di Papua dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penyelenggaraan program keagamaan dan kegiatan rohani secara rutin, seperti ibadah bersama, khotbah, doa bersama, dan ceramah agama yang dapat memperkuat iman dan kebersamaan di antara anggota Satgas. Kedua, penyediaan layanan konseling atau pendampingan rohani untuk membantu anggota Satgas mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang mereka hadapi di lapangan.

Ketiga, penyediaan literatur dan materi pembinaan rohani yang relevan dengan situasi operasional di Papua untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral anggota Satgas. Keempat, memfasilitasi dialog dan diskusi yang terbuka tentang nilai-nilai etika dan moral dalam pelaksanaan tugas operasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kondisi rohani anggota Satgas TNI AL dapat diperbaharui dan diperkuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat dan keberanian, serta tetap teguh dalam prinsip-prinsip keagamaan dan moral.

- 5) Perhatian yang layak bagi keamanan dan kedamaian terhadap keluarga prajurit yang ditinggal operasi. Perhatian yang layak bagi keamanan dan kedamaian keluarga prajurit yang ditinggalkan dalam operasi adalah hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan dukungan finansial yang mencukupi, menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta memastikan keamanan fisik dan psikologis keluarga tersebut. Selain itu, komunikasi yang teratur dan transparan dari pihak militer kepada keluarga prajurit, serta menyediakan program pendampingan dan bantuan sosial, juga akan sangat membantu dalam menjaga kesejahteraan dan kestabilan keluarga prajurit tersebut selama mereka menjalankan tugas di daerah operasi. Dengan memberikan perhatian yang layak kepada keluarga prajurit, pihak militer dapat memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dihargai, sehingga prajurit dapat fokus pada tugas mereka tanpa khawatir tentang kondisi keluarga di rumah.

d. Strategi Mini-Mini

- 1) Dukungan TNI AL secara moril terhadap tugas misi Perdamaian PBB. Dukungan TNI AL secara moral terhadap tugas misi perdamaian PBB adalah kunci dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas operasi perdamaian internasional. Ini mencakup memberikan dukungan moral kepada personel yang ditugaskan dalam misi perdamaian, mengapresiasi pengorbanan mereka untuk menjaga perdamaian dunia, serta memperkuat semangat kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dukungan moral juga mencakup memastikan bahwa personel TNI AL yang terlibat dalam misi perdamaian merasa didukung oleh pimpinan dan rekan-rekan mereka di dalam dan di luar lapangan. Dengan memberikan dukungan moral yang kuat, TNI AL dapat memastikan bahwa personel yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB tetap termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah konflik.
- 2) Mengefektifkan Kerjasama militer yang sudah ada. Meningkatkan efektivitas kerjasama militer yang sudah ada merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapabilitas dan kesiapan TNI AL. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain Perkuat Komunikasi dan Koordinasi: Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara unit-unit militer yang terlibat dalam kerjasama, baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum diskusi reguler, pertukaran informasi, dan latihan bersama. Optimalkan Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia melalui kolaborasi antara unit-unit militer, termasuk pembagian tugas yang jelas dan penggunaan bersama fasilitas dan peralatan yang ada. Peningkatan Pelatihan Bersama, dengan melakukan latihan bersama secara rutin dengan mitra-mitra militer, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memperkuat interoperabilitas dan membangun kepercayaan di antara pasukan. Fasilitasi Pertukaran Personel untuk mendorong pertukaran personel antara unit-unit militer dengan mitra-mitra internasional untuk memperluas pemahaman dan pengalaman dalam berbagai situasi operasional dan dukung Pembangunan Kapasitas berupa memberikan dukungan dalam pembangunan kapasitas mitra-mitra militer, termasuk melalui program pelatihan, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan. Dengan mengoptimalkan kerjasama militer yang sudah ada, TNI AL dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang handal dan memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.

- 3) Kerjasama dengan segala tokoh-tokoh di Papua sebagai jembatan dalam mengkampanyekan tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kerjasama dengan berbagai tokoh di Papua menjadi jembatan penting dalam mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan kesatuan NKRI. Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal, seperti pemimpin adat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat dibangun kesadaran bersama akan pentingnya keberagaman, toleransi, dan persatuan sebagai landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan Papua dalam konteks kesatuan bangsa Indonesia.

Strategi

Sebagai langkah dari berbagai analisis di atas maka gagasan inovatif untuk meningkatkan peran Satgas TNI AL di Papua dalam mendukung kebijakan Pemerintah RI dan Keutuhan NKRI adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO:

- a. Penyelarasan dan Sinergi Kebijakan. Mengintegrasikan dan menyelaraskan UU TNI No. 34/2004, UU Otsus 2001, kebijakan pemerintah, dan kebijakan Kemhan RI untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam menjalankan tugas Satgas TNI AL di Papua.
- b. Pembinaan Kekuatan TNI AL. Melakukan pembinaan kekuatan TNI AL yang mencakup pelatihan khusus, pemeliharaan peralatan, dan peningkatan kesiapan tempur untuk menghadapi tantangan di Papua.
- c. Penguatan Kepemimpinan Dansatgas. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Dansatgas melalui pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kemampuan manajerial untuk mengelola operasi Satgas TNI AL dengan efektif dan efisien.
- d. Peningkatan Loyalitas dan Semangat Juang Prajurit. Membangun budaya organisasi yang kuat yang mendorong loyalitas, dedikasi, dan semangat juang tinggi dari prajurit TNI AL dengan memberikan penghargaan, pengakuan, dan dukungan moril yang berkelanjutan.
- e. Kerjasama dengan Komponen Bangsa Lainnya. Memperkuat sinergi dengan TNI-Polri, lembaga pemerintah, dan komponen bangsa lainnya dalam mendukung operasi Satgas TNI AL di Papua melalui koordinasi yang lebih baik dan pertukaran informasi yang efektif.
- f. Peningkatan Citra TNI di Mata Masyarakat. Melakukan kampanye publik dan program komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra TNI di mata masyarakat Papua dengan fokus pada pemberitaan yang positif, pendekatan humanis, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
- g. Adaptasi terhadap Perkembangan Lingkungan Strategis. Mengadopsi pendekatan adaptif dan inovatif dalam merumuskan strategi operasional TNI AL di Papua dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, termasuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial di daerah tersebut.

Dengan menerapkan gagasan-gagasan ini, diharapkan TNI AL dapat mengoptimalkan peran Satgas TNI AL di Papua untuk mendukung stabilitas, keamanan, dan pembangunan di wilayah tersebut.

2. Strategi ST:

Dalam mengoptimalkan peran Satgas TNI AL di Papua dengan mempertimbangkan kekuatan yang telah disebutkan dan faktor-faktor tambahan yang meliputi perhatian PBB terhadap Papua, endorsement negara-negara asing bagi kemerdekaan Papua, organisasi ULMWP, Melanesian Spearhead Group (MSG), KKB/KST Papua, dan kelompok masyarakat yang mendukung separatis, berikut adalah beberapa gagasan yang dapat dilakukan oleh TNI AL:

- a. Penguatan Intelijen dan Pengawasan Perbatasan. Meningkatkan kegiatan intelijen dan pengawasan perbatasan untuk mencegah infiltrasi dan aktivitas ilegal dari kelompok separatis serta memonitor perhatian dan intervensi PBB terhadap Papua.

- b. Diplomasi dan Komunikasi Internasional. Menggunakan diplomasi yang kuat dan komunikasi aktif dengan negara-negara asing untuk menjelaskan posisi resmi Indonesia terkait Papua, serta membendung upaya endorsement bagi kemerdekaan Papua dari pihak-pihak luar.
- c. Penguatan Kerjasama Regional. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota MSG dan aktif terlibat dalam forum regional untuk memperkuat dukungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Papua.
- d. Pemberdayaan Masyarakat. Melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpuasan dan mendukung kelompok masyarakat yang cenderung mendukung separatisme dengan memberikan alternatif pembangunan dan pendidikan.
- e. Konsolidasi Otoritas Pemerintah. Memperkuat konsolidasi otoritas pemerintah di Papua dengan meningkatkan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan untuk meredam dukungan terhadap gerakan separatisme.
- f. Penegakan Hukum yang Tegas. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap KKB/KST Papua serta memperkuat kerjasama dengan aparat keamanan lainnya untuk mengatasi ancaman keamanan yang timbul dari kelompok-kelompok tersebut.

3. Strategi WO:

Berikut adalah beberapa gagasan yang dapat dilakukan oleh TNI AL untuk mengoptimalkan peran Satgas TNI AL di Papua dengan mempertimbangkan berbagai isu dan peluang yang ada:

- a. Penyelesaian Isu Historis Papua. Mengadakan dialog terbuka dan inklusif dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap isu historis Papua.
- b. Peningkatan Kesadaran HAM. Melakukan pelatihan dan pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Satgas TNI AL untuk memastikan kegiatan operasional mereka selalu mematuhi prinsip-prinsip HAM.
- c. Promosi Kesejajaran Ras Papua. Mendorong pembentukan program-program inklusif yang mempromosikan kesejajaran dan kesetaraan ras Papua dalam semua aspek kehidupan.
- d. Pengurangan Kesenjangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Menginisiasi program-program pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya di Papua, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- e. Penguatan Pengawasan Otonomi Khusus. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa otonomi khusus digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
- f. Koordinasi dengan Pihak Asing. Memperkuat kerjasama dengan pihak asing melalui diplomasi militer dan pertukaran informasi untuk mengatasi dugaan keterlibatan negara asing di Papua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keamanan nasional.
- g. Penghargaan terhadap Kearifan Lokal Papua. Memberikan penghargaan dan mendukung inisiatif-inisiatif yang mempromosikan dan mempertahankan kearifan lokal Papua sebagai bagian dari identitas dan budaya yang kaya.
- h. Dialog dengan Ide Separatisme. Mengadakan dialog terbuka dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung ide separatisme untuk memahami dan mengatasi akar permasalahan serta mencari solusi damai dan berkelanjutan.
- i. Penghindaran Pelabelan Terhadap Kelompok Separatisme. Menghindari pelabelan yang merugikan terhadap kelompok separatisme dan mempromosikan pendekatan yang inklusif dan dialogis dalam menangani isu-isu konflik di Papua.
- j. Penerapan Perpres Turunan dari UU No. 34/2004. Mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan perpres turunan dari UU No. 34/2004 tentang TNI yang belum

ada, untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi TNI AL dalam menjalankan tugasnya di Papua.

4. Strategi WT:

Dalam menghadapi dinamika kompleks di Papua, TNI AL dapat mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Komitmen Terhadap Dialog dan Diplomasi. TNI AL dapat memperkuat diplomasi dengan PBB dan negara-negara asing untuk menjelaskan posisi Indonesia terkait Papua dan mempromosikan dialog damai sebagai solusi bagi isu-isu yang kompleks.
- b. Penguatan Kerjasama Regional. TNI AL dapat meningkatkan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk memperkuat dukungan regional terhadap kedaulatan Indonesia di Papua dan mengurangi pengaruh organisasi seperti ULMWP.

Penindakan Terhadap KKB/KST:

- a. TNI AL harus meningkatkan operasi penindakan terhadap KKB/KST Papua untuk mengurangi ancaman keamanan dan menciptakan kondisi yang stabil bagi masyarakat Papua.
- b. Promosi Kesetaraan Ras dan Kesejahteraan Sosial. TNI AL dapat terlibat dalam program-program pembangunan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya di Papua, serta mempromosikan kesetaraan ras dan hak asasi manusia.
- c. Penguatan Kebijakan Otonomi Khusus. TNI AL harus berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki implementasi otonomi khusus di Papua, serta memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan kebijakan tersebut.
- d. Pengawasan Terhadap Pelabelan dan Propaganda Separatis. TNI AL dapat melakukan pengawasan terhadap pelabelan terhadap kelompok separatisme dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang identitas Papua serta mendorong inklusi dan dialog antar berbagai kelompok masyarakat.
- e. Penegakan Hukum dan Penghargaan Kearifan Lokal. TNI AL harus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan memastikan penghargaan terhadap kearifan lokal Papua dalam operasi mereka.
- f. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat. TNI AL dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat Papua tentang nilai-nilai Pancasila, persatuan nasional, dan pentingnya keberagaman untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu Papua.
- g. Kerjasama dengan PBB dan Lembaga Internasional. TNI AL dapat meningkatkan kerjasama dengan PBB dan lembaga internasional lainnya dalam memantau dan menangani isu-isu di Papua serta memperjuangkan solusi yang adil dan berkelanjutan.
- h. Advokasi terhadap Keterlibatan Asing. TNI AL harus melakukan advokasi aktif terhadap dugaan keterlibatan negara asing di Papua dengan mengumpulkan bukti dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengatasi ancaman tersebut.

SIMPULAN

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan telah di analisis serta dibahas melalui proses penelitian dengan mekanisme yang mengacu pada metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui studi pustaka dan berdasarkan pengalaman (empiris) dengan pertimbangan memungkinkan penulis untuk melihat dan memahami konteks terjadi pada kurun waktu tertentu atau konteks normatif dan teoritis literasi. Dengan dituntun oleh rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan di bagian awal penelitian ini, berdasarkan pada teori-teori yang digunakan, dikaitkan dengan hasil interpretasi peneliti terhadap fenomena-fenomena yang ada, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan konstruktif untuk menjawab rumusan masalah serta sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini “ Optimalisasi Peran Satgas TNI AL di Papua dalam mendukung kebijakan Pemerintah dan

Keutuhan NKRI, maka penelitian ini melahirkan suatu gagasan inovatif Kolaborasi *Maxi-Maxi Strength dan Opportunity* (SO) sebagai berikut:

1. Penyelarasan dan Sinergi Kebijakan. Mengintegrasikan dan menyelaraskan UU TNI No. 34/2004, UU Otsus 2001, kebijakan pemerintah, dan kebijakan Kemhan RI untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam menjalankan tugas Satgas TNI AL di Papua.
2. Pembinaan Kekuatan TNI AL. Melakukan pembinaan kekuatan TNI AL yang mencakup pelatihan khusus, pemeliharaan peralatan, dan peningkatan kesiapan tempur untuk menghadapi tantangan di Papua.
3. Penguatan Kepemimpinan Dansatgas. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Dansatgas melalui pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kemampuan manajerial untuk mengelola operasi Satgas TNI AL dengan efektif dan efisien.
4. Peningkatan Loyalitas dan Semangat Juang Prajurit. Membangun budaya organisasi yang kuat yang mendorong loyalitas, dedikasi, dan semangat juang tinggi dari prajurit TNI AL dengan memberikan penghargaan, pengakuan, dan dukungan moril yang berkelanjutan.
5. Kerjasama dengan Komponen Bangsa Lainnya. Memperkuat sinergi dengan TNI-Polri, lembaga pemerintah, dan komponen bangsa lainnya dalam mendukung operasi Satgas TNI AL di Papua melalui koordinasi yang lebih baik dan pertukaran informasi yang efektif.
6. Peningkatan Citra TNI di Mata Masyarakat. Melakukan kampanye publik dan program komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra TNI di mata masyarakat Papua dengan fokus pada pemberitaan yang positif, pendekatan humanis, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
7. Adaptasi terhadap Perkembangan Lingkungan Strategis. Mengadopsi pendekatan adaptif dan inovatif dalam merumuskan strategi operasional TNI AL di Papua dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, termasuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, R. (2019). Strategies for Maintaining the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) through the Strengthening of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua Region. *Journal of Maritime Security*, 7(1), 88-105.
- Pratama, A. (2018). Maintaining the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) through the Optimization of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua Region. *Journal of National Defense Studies*, 5(1), 78-93.
- Raharjo, S. (2016). Challenges and Strategies of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua Region: A Case Study of Maintaining the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). *Journal of Defense and Security Studies*, 8(2), 175-190.
- Santoso, D. (2017). The Effectiveness of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Supporting Government Policies in Papua Region. *Indonesian Journal of Maritime Affairs*, 15(3), 210-225.
- Setiawan, R. (2018). The Role of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua: A Study on Supporting Government Policies and Maintaining National Integrity. *Journal of National Security*, 14(3), 320-335.
- Soegeng, T. (2019). The Role of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) in Papua Region: Challenges and Opportunities. *Journal of Maritime Studies*, 12(2), 145-162.
- Suryono, W. (2021). *Optimalization of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) Role in Papua Region to Support Government Policies and Maintain the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)*. Jakarta: Indonesian Naval Institute Press.

- Susanto, A. (2015). The Implementation of Government Policies in Papua: Challenges and Solutions from Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) Perspective. *Pacific Security Studies Journal*, 3(2), 45-60.
- Widodo, B. (2020). *Government Policies and Security Challenges in Papua: A Case Study of Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) Operations*. Jakarta: Ministry of Defense Press.
- Wijaya, A. (2020). *Indonesian Navy Task Force (Satgas TNI AL) Operations in Papua: Challenges and Future Directions*. Jakarta: Center for Defense and Security Studies.